

Analisis Komparatif Laporan Keuangan Berbasis Kas Menuju Akruai Di Desa Onozitoli Sifaoroasi Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunung Sitoli

Penulis:

Mei Cahyanti
Telaumbanua¹
Serniati Zebua²
Tri Hartati Sukartini
Hulu³
Dedi Irawan Zebua⁴

Afiliasi:

Universitas Nias

Korespondensi:

chayantimei302@gmail.com¹
sernizebua97@gmail.com²
tryhulu21@gmail.com³
dedizebua8@gmail.com⁴

Histori Naskah:

Submit: 03-10-2024
Accepted: 18-10-2024
Published: 01-11-2024

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis komparatif terhadap laporan keuangan yang disusun dengan basis kas dan basis akrual untuk memahami perbedaan dampaknya terhadap kualitas informasi keuangan di Desa Onozitoli Sifaoroasi Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli. Basis kas mencatat transaksi ketika kas diterima atau dibayarkan, sementara basis akrual mengakui pendapatan dan beban saat terjadinya transaksi tanpa memperhatikan arus kas. Penelitian ini mengkaji bagaimana peralihan dari basis kas ke basis akrual mempengaruhi keakuratan, transparansi, dan relevansi laporan keuangan. Dengan menggunakan metode analisis data laporan keuangan dari berbagai perusahaan yang telah beralih dari basis kas ke basis akrual, studi ini mengevaluasi manfaat dan tantangan yang dihadapi dalam proses transisi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan basis akrual dalam laporan keuangan memberikan gambaran yang jauh lebih akurat tentang posisi keuangan dan kinerja dibandingkan dengan basis kas. Dengan mencatat transaksi saat terjadinya, bukan hanya saat kas berpindah tangan, basis akrual memungkinkan pengukuran yang lebih tepat terhadap kewajiban dan piutang serta hasil ekonomi yang sesungguhnya

Kata kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Dana Desa

Pendahuluan

Sebagai penghubung langsung antara pemerintah dan masyarakat, desa menjadi fokus pembangunan pemerintah, karena sebagian besar wilayah Indonesia berada di pedesaan. Pemerintah daerah merupakan pemerintahan terkecil yang mempunyai hubungan langsung dengan masyarakat, sehingga pemerintah daerah dapat langsung membantu pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan, pekerjaan umum dan pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan program pemerintah akan lebih cepat karena merupakan pemerintah daerah yang mempunyai hubungan langsung dengan masyarakat. desa. Ini adalah salah satu lembaga pemerintah Kementerian Pembangunan Pedesaan dan Hukum dalam mandatnya untuk mempromosikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Masyarakat di Desa Onozitoli Sifaoroasi sebelumnya menggunakan basis kas dalam pencatatan akuntansi mereka, yang lebih sederhana dan hanya mencatat transaksi saat kas benar-benar diterima atau dibayar. Namun, dengan transisi menuju akuntansi berbasis akrual, di mana transaksi dicatat saat terjadi, baik kas sudah diterima atau belum, muncul berbagai permasalahan. Salah satu perbedaan utama antara kedua basis ini adalah transparansi dan akurasi laporan keuangan. Basis kas tidak mencerminkan kewajiban dan piutang yang belum direalisasikan, sehingga kurang memberikan gambaran yang akurat



tentang kondisi keuangan. Sementara itu, basis akrual menawarkan pandangan yang lebih komprehensif dengan mencatat semua aset dan kewajiban. Tantangan yang dihadapi termasuk kurangnya pemahaman dan keterampilan akuntansi berbasis akrual, keterbatasan sistem dan infrastruktur pencatatan yang memadai, serta sumber daya manusia yang terbatas. Penelitian ini menarik untuk dilakukan guna meningkatkan Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa, serta membantu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual.

Peralihan dari laporan keuangan berbasis kas ke laporan berbasis akrual di Desa Onozitoli Sifaoroasi mencerminkan tantangan signifikan dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Laporan berbasis kas, yang hanya mencatat transaksi pada saat kas mengalir, sering kali memberikan gambaran yang tidak lengkap mengenai kondisi keuangan desa, sehingga menyulitkan pemangku kepentingan dalam mengevaluasi kinerja dan perencanaan keuangan jangka panjang. Sementara itu, laporan berbasis akrual, yang mencatat transaksi saat terjadinya meskipun kas belum berpindah tangan, menawarkan pemahaman yang lebih akurat mengenai kewajiban dan piutang desa, serta hasil ekonomi sesungguhnya. Peralihan ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk menganalisis bagaimana perubahan metode pelaporan ini mempengaruhi transparansi keuangan dan pengelolaan sumber daya di desa, serta untuk menilai kesiapan dan dampak pelaksanaannya terhadap pembuatan kebijakan dan akuntabilitas publik. Dengan analisis komparatif ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang jelas tentang tantangan dan manfaat dari pergeseran akuntansi ini, serta rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pelaporan keuangan di Desa Onozitoli Sifaoroasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Desa, Desa adalah suatu badan sosial dan hukum yang mempunyai batas wilayah, yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan kepentingan pemerintah dan masyarakat berdasarkan permasalahan sosial, asal usul, dan warisan. . . Dan itu dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. UU Desa menempatkan desa sebagai garda terdepan dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa diberi kekuasaan dan sumber daya keuangan untuk mengelola fasilitas yang ada guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan komunitasnya. Mereka mempunyai kewenangan untuk mengatur kantor, menyusun rencana pembangunan desa dan melaksanakannya secara mandiri. Pengelolaan desa dan sumber daya alamnya, termasuk pengelolaan uang dan harta benda desa, merupakan tanggung jawab desa. Dalam menjalankan tugas kepala desa, pemilik rumah mempunyai tugas yang sangat berat karena desa merupakan suatu kelompok yang terhubung langsung. Di dunia sekarang ini, peran pemimpin desa sangat penting dalam mendukung segala macam kegiatan pembangunan (Putri S.E. 2019).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014 Ayat (1) Pasal 71 UU No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa ekuitas rumah adalah hak dan kewajiban atas rumah yang dapat dibayar dengan uang dan segala sesuatu yang berupa uang dan barang. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Disebutkan juga pada ayat (2) bahwa adanya hak dan kewajiban akan berakibat pada pendapatan, pengeluaran, keuangan dan pengelolaan keuangan desa. Sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, PP. 24 tahun 2005. PP Nomor 58 Tahun 2005 dan. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. Pasal 13 Tahun 2006 mengatur bahwa pemerintah wajib menyusun laporan penjelasan keuangan yang meliputi laporan pelaksanaan anggaran, laporan posisi keuangan/neraca, laporan arus kas, dan Bukti Pelaporan Lembaga Keuangan (CaLK).

Menurut undang-undang otoritas pengawas nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan disingkat SAP, metode akuntansi digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan publik. Kerangka Akuntan Publik merupakan kerangka kunci untuk menetapkan dan mengembangkan standar akuntansi pemerintahan dan memberikan acuan bagi dewan standar akuntansi pemerintah, lembaga keuangan, melakukan audit dan menggunakan laporan keuangan untuk mencari

solusi permasalahan. Itu belum dikendalikan oleh pemerintah. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan..

Pemerintahan desa sering menghadapi tantangan dalam mengelola keuangan mereka secara efektif, terutama dengan sistem anggaran tradisional yang berbasis kas yang kurang memadai untuk mengelola kebutuhan yang semakin kompleks dan transparan. Adopsi akuntansi berbasis akrual muncul sebagai respons terhadap tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam pengelolaan dana publik. Ini membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kinerja keuangan desa serta memperbaiki kemampuan dalam perencanaan keuangan jangka panjang dan pengambilan keputusan strategis. Persyaratan peraturan dan standar akuntansi, termasuk pengaruh dari inisiatif internasional seperti IPSAS, juga dapat mempengaruhi kebijakan nasional tentang adopsi akuntansi berbasis akrual di tingkat desa. Meskipun transisi ini membutuhkan waktu dan sumber daya yang signifikan, manfaat jangka panjangnya mencakup peningkatan transparansi, potensi penghematan biaya, dan peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan pemerintahan desa

Desa Onozitoli Sifaoroasi. Desa ini terletak di wilayah pedalaman yang subur dengan topografi berbukit, dikelilingi oleh hamparan perkebunan milik warga desa. Onozitoli Sifaoroasi memiliki populasi sekitar kurang lebih 1500 penduduk yang mayoritas menggantungkan hidup dari pertanian, terutama tanaman padi, jagung, dan sayuran. Desa ini memiliki infrastruktur dasar yang terbatas, dengan akses jalan utama yang menghubungkan desa dengan desa terdekat yang lebih bagus, serta jaringan listrik yang telah mencakup sebagian besar desa tersebut.

Masyarakat Desa Onozitoli Sifaoroasi dikenal akan keramahan dan kebersamaannya, Meskipun menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan dan infrastruktur, semangat gotong royong dan kebersamaan tetap menjadi pendorong utama untuk kemajuan desa kedepan.

Akuntan pemerintah tidak berbeda dengan akuntan publik. Informasi akuntansi dapat dijelaskan melalui proses akuntansi khususnya analisis transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, penyesuaian entri jurnal, penyesuaian neraca saldo dan laporan keuangan.

Akuntansi secara umum merupakan suatu sistem informasi yang menghasilkan laporan bagi pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan keadaan suatu perusahaan. Laporan disusun dalam bentuk laporan keuangan dan tujuan umum laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan suatu entitas sehingga memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau tanggung jawab manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Komparatif Laporan Keuangan Berbasis Kas Menuju Akrual Di Desa Onozitoli Sifaoroasi Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli”

Studi Literatur

Akuntansi pemerintah

Akuntansi secara umum dibagi menjadi akuntansi swasta dan akuntan publik dapat didefinisikan sebagai normal. teknis Dan alat analisis akuntansi digunakan untuk pengelolaan NGGI, seperti penganggaran publik. sub-negara, Pemerintah daerah, BUMN, BUMD, lembaga swadaya masyarakat, yayasan sosial, proyek kemitraan publik-swasta, dll. Fungsi akuntan publik yaitu.. (New Lestari, Karamoy, Tang Kuman, 2014):

1. Negara tidak mencari keuntungan.

2. Negara-negara mencatat anggarannya pada saat pencatatannya.
3. Berbagai jenis dana dapat digunakan dalam akuntan publik.
4. Dalam akuntansi pemerintahan, belanja Aset seperti bangunan dan kendaraan dicatat di neraca beserta perkiraan laba operasi.
5. Dalam akuntansi pemerintahan, neraca tidak memuat perkiraan ekuitas dan akumulasi keuntungan..

Berbasis Akruwal

Laut Ratmono dan Mahfud Shulihin (2015:11). dalam (Alwie dkk. 2020), Akuntansi akrual adalah standar akuntansi yang mencatat dampak transaksi dan peristiwa lain pada saat terjadinya, Terlepas dari waktu Anda menerima uang atau jumlah uang yang sama.

Menurut Yurian A. (2020:78) basis akrual adalah suatu metode akuntansi dimana pendapatan dicatat pada saat terjadinya, tanpa memperhatikan pendapatan (pendapatan pertama atau terakhir), atau penerimaan kredit). , pengeluaran dicatat pada saat terjadinya (dibayar di muka, dibayar tunai, atau terjadi meskipun belum dibayar), tanpa memperhatikan penerimaannya.

Menurut Abdul Halim & Syam Kusufi (2012:53) menyimpulkan bahwa basis akrual dapat mencapai tujuan pelaporan yang tidak dapat dicapai dengan basis kas. Tujuan laporan adalah untuk pengelolaan dan pemantauan. Banyak permasalahan yang dapat diidentifikasi ketika menerapkan situs tersebut, antara lain :

1. Petugas menentukan jumlah transaksi yang dicatat dalam jurnal.
2. Relevansi akuntansi akrual menjadi terbatas jika dikaitkan dengan akuntansi historis dan akuntansi historis.
3. Proses manajemen dan manajemen biaya harus lebih kompleks dibandingkan arus kas.
4. Peluang manipulasi keuangan sulit dikendalikan.

Akuntansi akrual bertujuan Untuk mengatasi kekurangan akuntansi keuangan untuk pelaporan yang lebih akurat. Tujuannya adalah untuk menjadikan informasi mengenai belanja publik lebih transparan dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di pihak berwenang dengan memanfaatkan informasi secara lebih baik, daripada menggunakan uang.

Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Biaya

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ayat (8) pasal 1 dengan jelas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan SAP berbasis akrual adalah SAP mengakui pendapatan, beban, aset, liabilitas, dan ekuitas dalam laporan keuangan terutama berdasarkan basis entri keuangan dan akuntansi pendapatan, pengeluaran dan sumber daya keuangan dalam laporan pelaksanaan anggaran. Tergantung peruntukannya yang ditentukan dalam APBN atau APBD.

Yang juga penting, tidak mudah mengganti personel (SDM) yang terbiasa dengan pedoman lama. Bagaimanapun. perlu diingat bahwa akuntansi akrual diperlukan agar informasi yang disajikan dapat disajikan secara transparan dan bertanggung jawab. Standar akuntansi publik berbasis akrual diterapkan di lingkungan pemerintahan, khususnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Standar akuntansi berbasis akrual disajikan sebagai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan memuat kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Peralihan dari akuntansi kas ke akuntansi akrual menjadi akuntansi akrual penuh berdampak pada pencatatan dan jenis laporan keuangan yang disusun. Kapan akrual harus diselesaikan secara penuh untuk mencerminkan kemajuan. transaksi atau kejadian, keuntungan yang didapat dengan menerapkan regularisasi T adalah representasi informasi operasional atau operasional. Dalam akuntan publik, menggambarkan perkembangan operasi atau kegiatan. disusun

sebagai laporan operasi atau laporan surplus atau defisit. Dengan terbitnya PP No. Menurut Perpres 71 Tahun 2010, penerapan standar akuntansi publik berbasis akuntansi akrual mempunyai dasar hukum. Terbitnya Permendagri 64 tahun 2013 semakin memperjelas model akuntansi akrual yang diterapkan sejak tahun 2015. Artinya pemerintah wajib segera menerapkan SAP berbasis akrual. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tanggal 24 Tahun 2005. PP No. 24 Tahun 2005 dan PP No. 71 Tahun 2010 tidak jauh berbeda dengan adanya piutang. Aset tetap. Hutang mencerminkan proses akuntansi yang dipengaruhi oleh prinsip akuntansi akrual. Perbedaan nomor PP. 71 Tahun 2010 dengan PP No. 24/2005, tentang Komponen Laporan Keuangan,

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam kerangka penelitian ini, penulis menganalisis komparatif laporan keuangan berbasis kas menuju akrual. Data yang diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan Kepala desa, dan bendahara.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan deskriptif dalam proses analisis kualitatif yakni pendekatan menganalisis yang merinci dan menguraikan berbagai informasi yang menjadi suatu objek penelitian. tanpa melibatkan perhitungan statistik maupun data numerik. pendekatan ini melibatkan perbandingan antara fakta yang ada dengan teori yang berlaku pada Desa Onozitoli Sifaoroasi

Hasil

Laporan realisasi anggaran (LRA)

Tidak terdapat perbedaan LRA pada laporan keuangan berbasis CTA dan laporan keuangan berbasis klien karena adanya perbedaan penggunaan SAP. LRA ditampilkan dalam dana dalam laporan keuangan di CTA dan dalam laporan keuangan. Yang membedakan adalah LRA. Kedua laporan keuangan tersebut memuat bagian pendapatan, pengeluaran, dan simpanan terpisah, yang tidak sama setiap tahun. Perbedaan tersebut adalah:

1. Transfer dana dalam bentuk dukungan keuangan dari pemerintah provinsi lain hanya terdapat pada LRA 2015 dan pendapatan wajib lainnya dalam bentuk dana tunai tidak terdapat pada LRA 2014.
2. Perbedaan jenis pembayaran khususnya biaya administrasi berupa pembayaran bank dapat dilihat pada LRA tahun 2014.
3. Selisih transfer berupa tunjangan lainnya di LRA 2015 hanya 18.

Pembahasan

“Bagaimana Menganalisis Komparatif Laporan Keuangan Berbasis Kas Menuju Akrual”?

Menganalisis komparatif laporan keuangan berbasis kas menuju akrual melibatkan perbandingan antara laporan yang disusun berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas dengan laporan yang mencatat transaksi pada saat terjadinya, terlepas dari penerimaan atau pembayaran kas. Langkah pertama dalam analisis ini adalah memahami perbedaan antara basis kas dan basis akrual, di mana basis kas mencatat pendapatan dan beban hanya ketika kas benar-benar diterima atau dibayarkan, sementara basis akrual mencatat transaksi pada saat pendapatan diperoleh atau kewajiban diakui. Selanjutnya, penting untuk mengidentifikasi item-item seperti piutang, utang, pendapatan diterima dimuka, dan beban dibayar

dimuka yang membedakan kedua basis ini. Untuk melakukan analisis, laporan keuangan berbasis kas perlu disesuaikan ke basis akrual dengan menambahkan piutang dan beban yang masih harus dibayar, serta menghapus pendapatan diterima dimuka dan beban dibayar dimuka. Analisis ini mencakup perbandingan antara komponen-komponen laporan keuangan berbasis kas ke komponen-komponen laporan keuangan berbasis akrual.

Tabel 4.1 Komponen laporan keuangan

PP No.24 Tahun 2005 (Basis Kas Menuju Akrual)	PP No.71 Tahun 2010 (Basis Akrual)
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2. Neraca 3. Laporan Arus Kas 4. Laporan Perubahan Ekuitas 5. Catatan Atas Laporan Keuangan	1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Laporan Perubahn Saldo Anggaran Lebih 3. Neraca 4. Laporan Arus Kas 5. Laporan Operasional 6. Laporan Perubahn Ekuitas 7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Tabel 2.2 komparatif laporan keuangan

komponen	Basis kas	Basis akrual
Laporan realisasi anggaran (LRA)	Menampilkan pendapatan dan belanja ketika kas diterima atau dibayarkan	Menunjukkan pendapatan dan belanja sesuai anggaran namun tidak memperhitungkan piyang dan utang belum terjadi
Laporan perubahan saldo anggaran lebih(sal)	Tidak tersedia dalam basis kas	Menyajikan perubahan dalam saldo anggaran lebih(sal) yang dihasilkan surplusatau devisit anggran
neraca	Tidak tersedia dalam basis kas	Menyajiakn posisi keuangan pemerintah,termasuk aset, kewajiban,dan ekuitas.
Laporan operasioanl	Tidak tersedia dalam basis kas	Menyajikan seluruh pendapatan dan beban

		pemerintah dalam suatu periode akuntansi tanpa memperhatikan kapan kas diterima atau dibayarkan.
Arus kas	Menyajikan arus kas masuk dan keluar selama periode tertentu.	Basis kas, tetapi sebagai pelengkap laporan berbasis akrual untuk menunjukkan perubahan kas
Laporan perubahan ekuitas	Tidak tersedia dalam basis kas	Menunjukkan perubahan ekuitas selama periode akuntansi, termasuk surplus atau defisit, koreksi, dan penyesuaian lainnya.
Catatan atas laporan keuangan	Terbatas atas informasi kas yang relevan.	Menyajikan penjelasan rinci tentang kebijakan akuntansi, estimasi penting, serta penjelasan tambahan terkait item dalam laporan keuangan dalam berbasis akrual

Perbedaan utama antara analisis basis dan analisis kas dalam konteks keuangan desa terletak pada cara pencatatan dan pelaporan transaksi. Analisis basis merujuk pada metode akuntansi di mana pendapatan dan biaya dicatat saat terjadi, terlepas dari kapan kas benar-benar diterima atau dibayar. Ini memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang kinerja keuangan desa dengan mencerminkan semua kewajiban dan piutang yang ada. Sebaliknya, analisis kas fokus pada aliran kas yang sebenarnya, mencatat transaksi hanya ketika uang benar-benar masuk atau keluar.

Metode ini memberikan pandangan yang lebih jelas tentang likuiditas desa dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, namun mungkin kurang menunjukkan kewajiban yang belum dibayar atau pendapatan yang belum diterima. Dengan kata lain, analisis basis memberikan pandangan yang lebih komprehensif terhadap posisi keuangan, sementara analisis kas lebih fokus pada ketersediaan dana secara real-time.

Laporan keuangan berbasis kas dan berbasis akrual pada pemerintah memiliki perbedaan yang mendasar dalam hal pencatatan dan pelaporan. Pada basis kas, laporan yang disajikan lebih terbatas hanya mencakup Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas, di mana pendapatan diakui saat kas diterima, dan belanja diakui saat kas dibayarkan. Tidak ada laporan yang mencerminkan posisi keuangan atau operasional secara keseluruhan, seperti neraca atau laporan operasional, karena basis kas tidak mencatat piutang, utang, atau aset tetap.

Sebaliknya, laporan keuangan berbasis pendapatan menunjukkan keadaan keuangan pemerintah. Basis akrual tidak hanya menyajikan Laporan Realisasi Anggaran tetapi juga memperkenalkan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), yang menunjukkan perubahan surplus atau defisit anggaran. Neraca menjadi komponen utama dalam basis akrual, menggambarkan posisi keuangan pemerintah dengan mencatat seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pada akhir periode. Selain itu, Laporan Operasional mencakup seluruh pendapatan dan beban, tidak tergantung pada penerimaan atau pembayaran kas, yang memberikan wawasan tentang kinerja operasional pemerintah selama periode tertentu.

Laporan Arus Kas dalam basis akrual tetap relevan dan disajikan untuk melengkapi laporan keuangan lainnya dengan menunjukkan perubahan kas selama periode. Laporan Perubahan Ekuitas juga diperkenalkan untuk mengungkapkan perubahan ekuitas pemerintah yang tidak hanya berasal dari surplus atau defisit, tetapi juga penyesuaian lainnya yang mempengaruhi ekuitas secara langsung. Catatan atas Laporan Keuangan dalam basis akrual memberikan informasi yang lebih rinci dan penjelasan tambahan terkait kebijakan akuntansi dan estimasi penting, yang tidak ditemukan dalam basis kas.

Laporan realisasi anggaran (LRA)

Tidak terdapat perbedaan LRA pada laporan keuangan berbasis CTA dan laporan keuangan berbasis klien karena adanya perbedaan penggunaan SAP. LRA ditampilkan dalam dana dalam laporan keuangan di CTA dan dalam laporan keuangan. Yang membedakan adalah LRA. Kedua laporan keuangan tersebut memuat bagian pendapatan, pengeluaran, dan simpanan terpisah, yang tidak sama setiap tahun. Perbedaan tersebut adalah:

1. Transfer dana dalam bentuk dukungan keuangan dari pemerintah provinsi lain hanya terdapat pada LRA 2015 dan pendapatan wajib lainnya dalam bentuk dana tunai tidak terdapat pada LRA 2014.
2. Perbedaan jenis pembayaran khususnya biaya administrasi berupa pembayaran bank dapat dilihat pada LRA tahun 2014.
3. Selisih transfer berupa tunjangan lainnya di LRA 2015 hanya 18.

Laporan perubahan SAL

Laporan perubahan SAL hanya tersedia di akun reguler. Laporan SAL yang dimodifikasi disusun berdasarkan anggaran, namun tidak tercermin dalam laporan keuangan CTA. Akun SAL muncul dalam akun berdasarkan akrual untuk dibandingkan dengan akun pendapatan dan pengeluaran LRA. Saat ini di database CTA, pendapatan dan pengeluaran dilacak langsung ke dana, sehingga tidak ada rekening SAL. Laporan Perubahan SAL menyajikan SAL awal, penggunaan SAL sebagai penerimaan hibah tahun berjalan, SiLPA/SiKPA, perubahan rekening masa lalu, dll. dan SAL akhir.

Neraca

Baik metode akrual maupun metode CTA menggunakan metode akrual untuk mengakui, mengukur, dan mencatat aset, liabilitas, dan memang demikian. Oleh karena itu, informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas yang disajikan dalam neraca secara akrual sama dengan informasi dalam akun metode pembayaran. Perbedaan yang terjadi adalah sifat klasifikasi dan jenis akun yang dipilih. Misalnya, dalam neraca berbasis CTA, entri jurnal diposting ke akun aset dan liabilitas berdasarkan basis akrual. Perbedaan pelaporan keuangan antara saldo kas dan saldo CTA adalah:

1. Neraca akrual memberikan informasi tentang akun-akun yang beredar. Neraca memberikan informasi mengenai pendapatan/beban yang diterima/dibayar. dimuka (dibawa ke depan) dengan menggunakan metode aset/liabilitas. Pencatatan ini tidak ditampilkan dalam neraca terkait CTA, karena program CTA mengakui pendapatan dan biaya/beban secara tunai, sehingga pendapatan tersebut diakui sebagai penerimaan dan pembayaran/beban yang dibayarkan dengan rekening langsung pada saat kas atau setara kas diterima. Diterima/Dibayar Manfaat perbedaan ini adalah akumulasi saldo dapat memberikan informasi mengenai nilai barang/jasa yang belum diterima di masa yang akan datang relatif terhadap jumlah yang dibayarkan/diterima sebelum.

2. Neraca menyajikan informasi pendapatan dan pengeluaran (pos akrual). Informasi ini mencakup hutang dan kewajiban seperti pajak, biaya, biaya, dll. Neraca CTA juga mencatat debit untuk mencatat pendapatan yang diterima dan didukung dengan dokumen resmi seperti nasehat perpajakan, namun tunai/tunai. sama dengan belum diterima. Hutang Usaha dan Cadangan Hutang Usaha (bukan pendapatan) dicatat untuk transaksi ini. Saat ini untuk akumulasi beban, saldo CTA hanya mengakui kewajiban bunga saja dan tidak mengakui/mengakui beban utang lainnya, contoh: dampak selisih ini dapat berupa Neraca memberikan informasi mengenai nilai pendapatan/beban. terhutang Diakui sebagai pendapatan dan diperlakukan sebagai pendapatan/pembayaran, tetapi jumlah/uang yang sama diterima/tidak dibayar..
3. 3. Neraca periodik menyajikan informasi mengenai penyusutan aktiva tetap. Dalam metode akrual, penyusutan aset tetap dicatat sebagai beban penyusutan yang disajikan dalam LO, dan akumulasi beban penyusutan disajikan dalam neraca. Dalam database CTA, transaksi yang berkaitan dengan aset tetap seperti pembelian, penjualan dan pelepasan aset tetap dicatat pada akun pendapatan tetap dan investasi pada akun pendapatan tetap. Informasi aset tetap yang disajikan dalam neraca pada CTA tidak lengkap karena hanya menampilkan nilai bersih aset tetap pada tanggal pelaporan dan tidak sebesar nilai penyusutan aset tetap sampai dengan tanggal pelaporan. . Manfaat dari perbedaan tersebut adalah neraca dapat memberikan informasi mengenai nilai penyusutan aktiva tetap sejak digunakan sampai dengan tanggal neraca..
4. Neraca menunjukkan secara moneter, menunjukkan nilai bersih kekayaan pemerintah, dikurangi dengan akun-akun yang berhubungan dengan pendapatan, terutama neraca/defisit LO , termasuk kenaikan/penurunan keakuratan karena perubahan kosmetik sekaligus , CTA-air tidak sepenuhnya mencerminkan keakuratan presentasi. Reksa dana hanya memuat rekening-rekening yang muncul karena merupakan catatan berwarna yang membantu mencatat dan mencatat aset dan kewajiban secara akrual. Selain itu juga ada SiLPA/SiKPA berdasarkan satuan keuangan yang dihitung berdasarkan dana. Ekuitas digunakan dalam neraca CTA untuk menyeimbangkan aset dan kewajiban, yang tidak mencerminkan laba bersih pemerintah secara akurat. Dampak dari perbedaan tersebut adalah saldo tersebut mewakili nilai wajar, yang merupakan nilai sebenarnya dari kekayaan bersih pemerintah, yang informasinya diberikan kepada EPL..

Laporan Operasional (LO)

LO pada akun-akun disajikan berdasarkan basis akrual. Berdasarkan CTA, entitas pelapor diperbolehkan untuk menyiapkan laporan kinerja keuangan yang menunjukkan pendapatan, pengeluaran, dan laba/rugi berdasarkan basis akrual. Namun pelaporan tidak mengikat kinerja keuangan ini. LO melaporkan pendapatan, pengeluaran dan saldo/kerugian berdasarkan basis akrual, tanpa memperhatikan kapan kas atau setara kas diterima. LO menunjukkan pendapatan, pengeluaran LO, pendapatan operasional, pendapatan operasional, pendapatan operasional, pendapatan, penyusutan sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan LO positif/negatif. LO memiliki struktur keuangan yang sama dengan LRA. Namun pendapatan LO disajikan berdasarkan basis akrual, sedangkan pendapatan LRA disajikan berdasarkan basis kas. Harga LO ditampilkan berdasarkan akrual. Selain itu, LO menyediakan opsi pembayaran non tunai. Biaya-biaya tersebut antara lain:Biaya buku adalah nilai barang yang dikonsumsi/hilang (bukan nilai barang terjual) selama periode pelaporan. Biaya persediaan timbul setelah penyesuaian nilai persediaan pada periode berjalan dikurangi saldo persediaan pada akhir periode. Keuntungan menampilkan akun utang usaha adalah LO dapat memberikan informasi nilai barang bekas atau usang selama periode pelaporan. Selain itu, nilai buku dikaitkan dengan nilai buku yang ditampilkan di neraca secara akrual pada tanggal pelaporan, sehingga menjamin keandalan nilai buku yang ditampilkan di neraca.

1. Penyusutan aktiva tetap adalah hilangnya nilai aktiva tetap selama umur aktiva tetap tersebut. Tarif tidak ditampilkan di database CTA. Basis data CTA mencakup penyusutan aset tetap sebagai penyusutan aset tetap dan investasi pada aset tetap. Manfaat pelaporan

- penyusutan LO dapat memberikan informasi mengenai nilai penyusutan aset tetap selama periode pelaporan.
2. Penyisihan piutang tak tertagih merupakan cadangan yang harus digunakan pada tingkat tertentu atas piutang tak tertagih yang berkaitan dengan penagihan utang dan tagihan. Menurut CTA, pencatatan piutang dicatat dengan baik untuk mengurangi piutang usaha dan membayar piutang. Dampak dari pertunjukan tersebut.
 3. Penyisihan piutang tak tertagih adalah dimana LO dapat memberikan informasi mengenai nilai utang yang tidak dapat ditagih/dihapuskan selama periode akuntansi karena tidak dapat dipulihkan. LO menunjukkan laba/rugi dari aktivitas nonpengendali, termasuk laba/rugi dari penjualan aset jangka panjang dan pembayaran utang jangka panjang. LO juga menunjukkan surplus/defisit pos-pos luar biasa termasuk pendapatan dan pengeluaran.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS(LPE)

LPE ditampilkan dalam akun berdasarkan akrual. LPE menunjukkan kenaikan/penurunan ekuitas selama suatu periode pelaporan. LPE berkaitan dengan LO dan neraca. LPE memasukkan nilai surplus/batas LO sebagai kenaikan/pengurangan dari ekuitas dan memberikan saldo ekuitas akhir yang ditunjukkan di neraca. LPE Pemerintah Kota Batu tahun 2015 berupa aset primer, saldo/defisit LO, efek kumulatif perubahan kebijakan/defisit fundamental, reformasi fundamental yang berdampak langsung pada pemilik modal dan keadilan final.

LAPORAN ARUS KAS(LAK)

SAR pada laporan keuangan CTA dan laporan keuangan dalam proses tidak berbeda karena adanya perbedaan penggunaan SAP. LAK ditampilkan dalam dana dalam laporan keuangan terkait CTA dan dana tersebut. Perbedaan SAR kedua laporan keuangan²⁰ bergantung pada jenis/sumber pendapatan dan sifat pembayarannya, yang tidak sama setiap tahunnya. LAK Arus kas dari aktivitas operasi, Arus kas dari aktivitas investasi, Arus kas dari aktivitas pendanaan, Arus kas dari aktivitas perdagangan, Kenaikan/penurunan arus kas selama periode pelaporan, Awal pendapatan dari BUD, Akhir BUD. , saldo awal dana investasi JKN, saldo akhir dana investasi JKN, dan saldo akhir.

Tabel 2. Laporan Realisasi Dan Anggaran Belanja Desa Tahun 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Lebih/(kurang) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan asli desa	1.702.350,00	1.702.350,00	0.00
4.1.1.	Hasil usaha desa	1.702.350,00	1.702.350,00	0.00
4.2.	Pendapatan transfer	1.287.033.375.00	1.287.033.375.00	0.00
4.2.1.	Dana desa	7.604.000.00.00	7.604.000.00.00	0.00
4.2.2.	Bagi hasil pajak dan restribusi	29.964.285.00	29.964.285.00	0.00.
4.2.3.	Alokasi dana desa	469.465.090.00	469.465.090.00	0.00
4.3.	Pendapatan lain lain	0.00	1.517.261.00	(1.517.261.00)
4.3.6.	Bunga bank	0.00	1.517.261.00	(1.517.261.00)
5	JUMLAH PENDAPATAN	1.288.735.725.00	1.290.252.986.00	(1.517.261.00)
5.1.	BELANJA			
	Belanja pegawai	327.496.360.00	327.496.360.00	0.00

5.1.1.	Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	29.119.680.00	29.119.680.00	0.00
5.1.2.	Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa	229.025.620.00	229.025.620.00	0.00
5.1.3.	Jaminan sosial kepala desa dan perangkat desa	4.191.060.00	4.191.060.00	0.00
	Tunjangan BPD	65.160.000.00	65.160.000.00	0.00
	Belanja barang dan jasa	515.244.139.00	501.402.749.00	13.841.390.00
	Belanja barang pelengkapan	159.888.639.00	148.193.797.00	11.394.842.00
5.1.4.	Belanja jasa honorarium	104.750.000.00	102.050.000.00	2.700.000.00
5.2.	Belanja perjalanan dinas	41.000.000.00	41.000.000.00	0.00
5.2.1.	Belanja operasional perkantoran	4.657.000.00	4.960.452.00	(303.452.00)
	Belanja pemeliharaan	21.268.000.00	21.268.000.00	0.00
5.2.2.	Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada	183.680.500.00	183.680.500.00	50.000.00
5.2.3.	Belanja modal	254.021.560.00	254.021.560.00	0.00
5.2.5.	Belanja modal pengadaan peralatan, mesin dan alat	24.1000.000.00	24.1000.000.00	0.00
5.2.6.	Belanja modal irigasi/embung/drainasee/air limbah	229.912.560.00	229.912.560.00	0.00
5.2.7.	Belanja tidak terduga		194.400.000.00	
5.3.	Belanja tidak terduga	202.518.100.00		8.118.100.00
5.3.2.			194.400.000.00	
		202.518.100.00		8.118.100.00
5.3.7.	Jumlah belanja	1.299.271.159.00	1.227.311.669.00	21.959.490.00
5.4				
5.4.1.				
	Surplus/(devisit)	(10.535.434.00)	12.941.317.00	(23.476.751.00)
6				
6.1.	Pembiayaan			
6.1.1.	Penerimaan pembiayaan SILPA tahun sebelumnya	10.535.434.00	10.535.434.00	00
		10.535.434.00	10.535.434.00	00
	PEMBIAYAAN NETTC	10.535.434.00	10.535.434.00	00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURAN G) (Rp)
1	2	3	4	5
	Sisa lebih pembiayaan anggaran	0.00	23.476.751.00	(23.476.751.00)

Dalam menganalisis laporan keuangan berbasis kas menuju akrual, terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan berdasarkan data yang disajikan. Secara keseluruhan, laporan keuangan menunjukkan bahwa realisasi pendapatan sebesar Rp1.290.252.986,00 melebihi anggaran yang direncanakan sebesar Rp1.288.735.725,00 dengan selisih sebesar Rp1.517.261,00. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya pendapatan lain-lain dan bunga bank yang tidak direncanakan, yang menambah total pendapatan.

Di sisi belanja, realisasi belanja sebesar Rp1.227.311.669,00 juga lebih rendah dibandingkan anggaran Rp1.299.271.159,00, menghasilkan surplus belanja sebesar Rp21.959.490,00. Namun, perlu dicatat bahwa terdapat beberapa perbedaan signifikan dalam komponen belanja barang dan jasa, terutama pada belanja operasional perkantoran yang mengalami kekurangan realisasi sebesar Rp303.452,00 dan belanja barang pelengkapan yang surplus sebesar Rp11.394.842,00.

Surplus anggaran di laporan kas menunjukkan bahwa setelah belanja, terdapat selisih surplus Rp12.941.317,00, sementara akumulasi SILPA tahun sebelumnya menunjukkan saldo yang positif sebesar Rp10.535.434,00. Sehingga, total surplus pembiayaan adalah Rp10.535.434,00, meskipun ada selisih signifikan dalam laporan realisasi yang menunjukkan surplus yang lebih besar sebesar Rp23.476.751,00.

Perubahan dari rekening tunai ke rekening tunai memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai situasi keuangan rumah tangga, karena basis akrual mencatat pendapatan dan beban pada saat terjadinya transaksi, bukan saat kas diterima atau dibayar. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa catatan akuntansi yang lebih detail untuk mencerminkan pengakuan pendapatan yang mungkin belum direalisasikan dalam laporan kas. Penerapan basis akrual akan membantu dalam memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi keuangan dan aliran dana desa secara keseluruhan

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peralihan dari laporan keuangan berbasis kas ke berbasis akrual memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kondisi keuangan desa. Laporan berbasis kas, meskipun sederhana dan mudah dipahami, hanya mencatat transaksi pada saat kas diterima atau dibayar, sehingga sering kali tidak mencerminkan kewajiban dan pendapatan yang belum terealisasi. Sebaliknya, laporan berbasis akrual mengakui pendapatan dan beban saat transaksi terjadi, memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kesehatan finansial desa dengan mencatat semua hak dan kewajiban yang ada. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa laporan berbasis kas menunjukkan surplus yang tampak lebih tinggi, sementara laporan berbasis akrual mengungkapkan adanya pendapatan yang masih harus diterima dan kewajiban yang belum dibayar, yang menyesuaikan perspektif keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, peralihan laporan berbasis akrual di desa akan meningkatkan transparansi, akurasi, dan efektivitas pengelolaan anggaran, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Proses transisi ke akrual harus dilakukan secara bertahap dengan pelatihan dan penyesuaian sistem yang memadai untuk memastikan manfaat maksimal dari perubahan ini.

Referensi

- Abdul Halim & Syam Kusufi. 2022. *Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi*. Salemba Empat : Jakarta
- Anandita, D. T. (2015). *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Pemerintahan Kota Bandung)* (Doctoral dissertation, Universitas Widyatama).
- Alwie, rahayu deny danar dan alvi furwanti, Adi Bagus Prasetio, Roni Andespa, Politeknik Negeri Lhokseumawe, dan Kata Pengantar. 2020. "Tugas Akhir Tugas Akhir." *Jurnal Ekonomi Volume 18, Nomor 1 Maret 2012* (1): 41–49.
- Hammam, J. (2017). Analisis Komparatif Laporan Keuangan Pemerintah Berbasis Kas Menuju Akrual Dan Laporan Keuangan Pemerintah Berbasis Akrual (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Batu). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(2)
- Putri, S E. 2019. "Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pemerintahan Desa Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura." <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/6563%0Ahttps://repository.uir.ac.id/6563/1/155310267.pdf>.
- Setyanto, E., & Ritchi, H. (2018). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Survey atas Kompetensi Aparatur, Kualitas Software SIA Penerapan SPI dan Penerapan SAP pada Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat). *AKURAT/ Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 9(1), 89-105.
- Indonesia, Undang-undang Republik. 2014. "https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/6TAHUN2014UU.htm 1/44."
- Tulangow, Andre P., dan VentjeTreesje Runtu Ilat. 2014. "Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa." *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 2 (4): 278–88.
- TUTI, I. K. Prosedur Pencairan Dana Belanja Langsung Barang Dan Jasa Progam Ppg Sd Negeri Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.
- Yurian, A. (2020). *Analisis Penerapan PSAK 101 (Studi Pada Baitul Maal Wat Tamwil Masyarakat Madani, Sumatera Utara)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).